Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085

Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

ANALISIS KEBIJAKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF SDGS: KAJIAN LITERATUR KEBIJAKAN PARIWISATA DI INDONESIA 2019-2025

Nira Sania Putri[1], Visye Antasya[2], Nabila Trisya Fathiyah[3], Katriza Imania[4], Galuh Efnol Adzan[5], Ade Maulidya[6]

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik
Universitas Sriwijaya[123456]
saputrinra199@gmail.com[1], visyeantasya@gmail.com[2], nabilatrisyaf3326@gmail.com[3], katrizaimania@fisip.unsri.ac.id[4], galuhefnoladzan@gmail.com[5], ademaulidya1@gmail.com[6]

ABSTRACT
Indonesia's rapid tourism growth, accompanied by mounting socio-ecological pressures, necessitates a shift towards sustainable tourism. In order to help accomplish SDGs 8 (Decent Work and Economic Growth) and 12 (Responsible Consumption and Production) for the years 2019-2025, this study will examine how Indonesia has developed its sustainable tourism policy. Employing a qualitative descriptive approach through a literature review, this study examines policy documents, government reports, and relevant scientific publications. The findings reveal that while the implementation of SDG 8 is more prominent in job creation and empowering Small and Medium-sized Enterprises (SMEs), it faces challenges related to job quality, including high rates of informality and limited social security. Meanwhile, the implementation of SDG 12 faces more significant hurdles, particularly concerning food waste management, plastic pollution, and resource management in tourist destinations. Overall, despite the establishment of a regulatory framework like Ministerial Regulation No. 9 of 2021, its implementation at the operational level remains suboptimal. This study recommends the development of more operational indicators, enhancement of local government capacity, and strengthening of multi-stakeholder collaboration to realize genuinely sustainable tourism.
***Keywords**: sustainable tourism, SDG 8, SDG 12, tourism policy, literature review.*

ABSTRAK
Pariwisata Indonesia mengalami pertumbuhan pesat namun diiringi tekanan sosial-ekologis, menegaskan perlunya pergeseran menuju pariwisata berkelanjutan. Tujuan studi ini adalah untuk mengkaji bagaimana strategi pariwisata berkelanjutan Indonesia dikembangkan untuk membantu mencapai SDGs 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) antara tahun 2019 dan 2025. Studi ini mengkaji laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan publikasi ilmiah relevan menggunakan metodologi kualitatif deskriptif dan metode tinjauan pustaka. Hasil menunjukkan bahwa implementasi SDG 8 lebih menonjol dalam penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan UMKM, namun dihadapkan pada tantangan kualitas pekerjaan seperti informalitas dan minimnya jaminan sosial. Sementara itu, implementasi SDG 12 menemui kendala lebih signifikan, terutama terkait pengelolaan limbah makanan, sampah plastik, dan pengelolaan sumber daya di destinasi wisata. Secara keseluruhan, meskipun kerangka regulasi seperti Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 telah terbentuk,

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagirism Checker No 278
DOI : Prefix DOI : 10.8734/panorama.v1i1.1395
Copyright : Author
Publish by : Panorama

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085

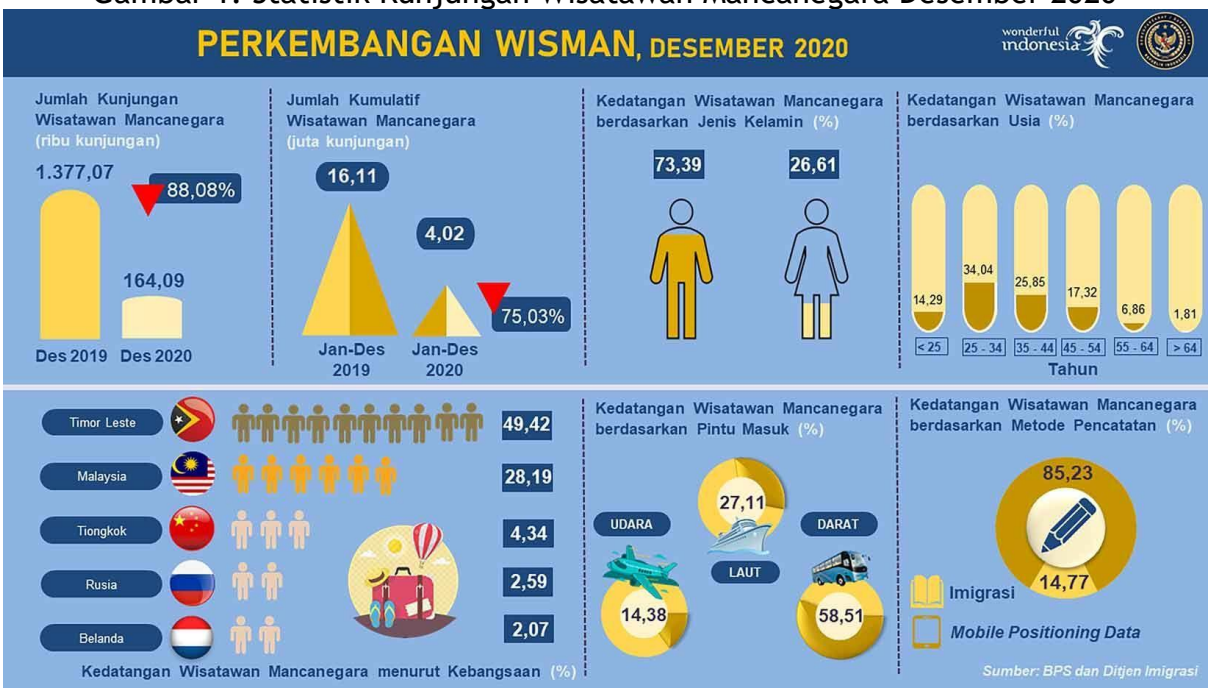
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

implementasi di tingkat operasional belum optimal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pengembangan indikator yang lebih operasional, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan penguatan kolaborasi multi-pihak untuk mewujudkan pariwisata yang benar-benar berkelanjutan.
Kata kunci: pariwisata berkelanjutan, SDG 8, SDG 12, kebijakan pariwisata, kajian literatur.

PENDAHULUAN

Perkembangan pariwisata Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan pertumbuhan yang sangat cepat, namun dibarengi dengan peningkatan tekanan sosial-ekologis pada destinasi wisata. Kementerian Pariwisata mencatat bahwa sebelum pandemi tepatnya pada tahun 2019, sektor pariwisata berkontribusi langsung hingga 4,9% terhadap PDB nasional dan menjadi penopang hidup 34 juta pelaku pariwisata di Indonesia (Kementerian Pariwisata, 2025). Pertumbuhan ini kemudian terpukul ketika pandemi COVID-19 menurunkan jumlah wisatawan mancanegara hingga turun 75% pada 2020, sebagaimana ditunjukkan dalam grafik penurunan kunjungan wisata pada Gambar 1. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya orientasi baru yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial, budaya, dan lingkungan.

Gambar 1. Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Desember 2020



Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi, Kemenparekraf/Baparekraf, 2020

Dalam konteks tersebut, dua tujuan pembangunan berkelanjutan yang paling relevan bagi sektor pariwisata Indonesia adalah SDG 8 (pekerjaan layak & pertumbuhan ekonomi) dan SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab). Modul Sustainable Tourism Development Kemenparekraf menegaskan bahwa arah pembangunan pariwisata Indonesia harus berbasis quality tourism yang mengutamakan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus memastikan praktik konsumsi-produksi yang lebih efisien dan bertanggung jawab (Teguh et al., 2022). SDG 8 relevan untuk memastikan pariwisata tetap menjadi sumber kerja yang inklusif, sementara SDG 12 penting untuk mengatasi persoalan limbah, penggunaan energi, jejak karbon, dan tekanan terhadap ekosistem yang meningkat akibat aktivitas wisata.

Meski arah kebijakan nasional sudah mengadopsi prinsip keberlanjutan, berbagai

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

penelitian menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Lolkary dan Laurens (2024) menemukan bahwa implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi hambatan pada aspek lingkungan dan pengelolaan sumber daya, meskipun terdapat kemajuan dalam aspek ekonomi. Tantangan tersebut diperparah oleh ketidakkonsistenan antara kebijakan pusat–daerah serta belum optimalnya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Hal ini menegaskan perlunya pemetaan ulang bagaimana pemerintah menyusun kebijakan pariwisata berkelanjutan untuk memastikan keterpaduan dengan target SDG 8 dan SDG 12.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan pariwisata berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian SDG 8 dan SDG 12 pada periode 2019–2025. Kajian ini menelaah perkembangan kebijakan, strategi pemerintah, serta tantangan utama yang dihadapi dalam mewujudkan pariwisata yang mampu menumbuhkan ekonomi secara inklusif sekaligus mendorong konsumsi dan produksi yang lebih bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode kajian literatur (literature review). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menelaah bagaimana pemerintah Indonesia merumuskan kebijakan pariwisata berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian SDG 8 dan SDG 12. Metode kajian literatur memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola kebijakan, serta keselarasan antara dokumen kebijakan nasional dan prinsip pembangunan berkelanjutan pada periode 2019–2025. Seluruh analisis dilakukan dengan menelaah hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi pemerintah, laporan kementerian/lembaga, serta publikasi ilmiah yang relevan dengan tema pariwisata berkelanjutan.

TINJAUAN LITERATUR

1. Pengertian Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan pengembangan pariwisata yang mempertimbangkan dampaknya terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, baik saat ini maupun di masa mendatang. Gagasan ini menekankan pentingnya kegiatan pariwisata untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, pelaku industri, lingkungan, dan penduduk lokal tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.Peraturan tersebut menjelaskan bahwa penerapan pariwisata berkelanjutan berlandaskan pada sejumlah prinsip utama, yaitu:

1. Pengelolaan destinasi yang terpadu dan berorientasi jangka panjang, mencakup perencanaan, koordinasi kelembagaan, monitoring, serta mitigasi perubahan terhadap tekanan wisata.
2. Keberlanjutan sosial dan ekonomi, yang memastikan bahwa manfaat ekonomi pariwisata dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal melalui peluang kerja, penguatan UMKM, dan distribusi manfaat yang merata.
3. Pelestarian budaya lokal, melalui perlindungan warisan budaya, pelibatan masyarakat adat, serta penguatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai identitas dan daya tarik destinasi.
4. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan, termasuk konservasi sumber daya alam, pengendalian limbah dan emisi, adaptasi perubahan iklim, serta pengendalian penggunaan lahan agar tidak merusak daya dukung ekologis.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keberlangsungan lingkungan, memperkuat struktur sosial budaya, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 berfungsi sebagai kerangka normatif yang memastikan pengembangan destinasi berlangsung secara bertanggung jawab, berimbang, dan selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Pariwisata dan SDGs : Kerangka Teoritis

Posisi Pariwisata Berkelanjutan dalam SDGS 8

SDG 8 mendorong lapangan kerja yang penuh dan produktif, pekerjaan layak untuk semua, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkelanjutan. Tujuan 8.9 yaitu pada tahun 2030, mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang mendukung pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan menonjolkan komoditas serta budaya daerah.

Pariwisata berkelanjutan memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian SDGS 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Sektor pariwisata dipandang mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal karena menciptakan beragam peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat usaha-usaha kecil yang berbasis pada potensi daerah. Aktivitas pariwisata menghasilkan rantai ekonomi yang melibatkan tenaga kerja, produk lokal, hingga layanan penunjang, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara merata oleh komunitas.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, wisata tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat secara inklusif. Lapangan kerja yang muncul dari sektor pariwisata dirancang agar bersifat layak, produktif, serta memberi manfaat jangka panjang. Selain itu, wisata berkelanjutan mendorong pengembangan UMKM sebagai bagian dari rantai ekonomi kreatif melalui produk budaya, kuliner, maupun kerajinan khas daerah. Dengan demikian, wisata berkelanjutan berperan sebagai instrumen yang memperkuat pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan penciptaan pekerjaan yang berkeadilan, stabil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal (Muqsith, 2023).

Peran Pemerintah dalam mewujudkan SDGS Tujuan 8 sasaran 8.9

Berdasarkan data Komnas HAM mengenai Tujuan 8 dalam kerangka SDGs, peran pemerintah dalam mewujudkan sasaran 8.9 menekankan pentingnya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata berkelanjutan yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus memajukan budaya dan produk lokal. Komnas HAM menempatkan sektor pariwisata dalam keterkaitannya dengan hak atas pekerjaan dan hak budaya, sehingga pemerintah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kontribusi ekonomi pariwisata, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas wisata melindungi kepentingan pekerja dan masyarakat setempat. Dalam konteks tersebut, pemerintah berkewajiban mengintegrasikan prinsip-prinsip kerja layak ke seluruh rantai nilai pariwisata, mulai dari perhotelan hingga UMKM lokal, termasuk menjamin kondisi kerja yang aman, upah yang adil, dan perlindungan bagi kelompok rentan yang bekerja di sektor ini.

Upaya pemerintah juga diarahkan pada pencapaian target nasional yang telah ditetapkan, seperti peningkatan kontribusi PDB pariwisata, pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan

nusantara, serta penyerapan tenaga kerja dalam sektor turisme. Untuk mencapai sasaran tersebut, pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan pariwisata dilakukan secara berkelanjutan, ramah lingkungan, dan melibatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan. Hal ini mencakup penguatan produk budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata, penyediaan akses pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil, serta perluasan akses terhadap layanan keuangan bagi UMKM pariwisata.

Selain aspek ekonomi, Komnas HAM menegaskan bahwa pemerintah harus memegang perspektif hak asasi manusia dalam setiap kebijakan pariwisata. Ini berarti pemerintah perlu memastikan bahwa ekspansi sektor wisata tidak menimbulkan eksploitasi tenaga kerja, tidak merusak lingkungan, dan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal. Pemerintah juga berkewajiban membangun infrastruktur, meningkatkan kapasitas lembaga daerah, dan menyediakan data serta informasi yang transparan untuk mendukung tata kelola pariwisata yang bertanggung jawab. Dengan demikian, menurut data Komnas HAM, peran pemerintah dalam sasaran 8.9 bukan hanya bertujuan mengembangkan pariwisata sebagai sektor ekonomi, tetapi memastikan bahwa pembangunan tersebut berlangsung secara inklusif, adil, dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Implementasi SDGs 8 dalam Pariwisata

SDG 8 atau *Decent Work and Economic Growth* berfokus pada penciptaan pekerjaan produktif, kesempatan kerja yang inklusif, serta perlindungan bagi pekerja. Dalam konteks Indonesia, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang paling potensial dalam mendukung tujuan ini karena kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengembangan UMKM. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas pekerjaan di sektor pariwisata Indonesia masih menghadapi tantangan struktural terkait informalitas, musimanitas, perlindungan sosial, serta disparitas kapasitas antar-daerah. Oleh karena itu, implementasi SDG 8 dalam kebijakan pariwisata perlu dianalisis tidak hanya dari aspek penciptaan pekerjaan, tetapi juga dari aspek keberlanjutan dan kualitas kerja.

Berbagai penelitian Indonesia telah menegaskan bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor kunci yang mendorong transformasi ekonomi daerah. Husna F.K (2022) menemukan bahwa perkembangan pariwisata di beberapa daerah berdampak langsung pada pemindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor jasa pariwisata, terutama pada usaha kuliner, homestay, transportasi wisata, serta usaha mikro berbasis komunitas. Namun, penelitian tersebut juga mencatat bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja ini tidak secara otomatis berkorelasi dengan peningkatan formalitas pekerjaan atau jaminan sosial. Banyak pekerja baru yang masuk ke sektor pariwisata tidak memperoleh kontrak kerja tetap dan bekerja berdasarkan permintaan musiman, sehingga rentan terhadap fluktuasi pendapatan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang *Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan* sebagai kerangka utama implementasi SDG di sektor pariwisata. Dalam pedoman ini, dimensi *socio-economic sustainability* menjadi salah satu pilar yang mewajibkan destinasi untuk memastikan pemerataan manfaat ekonomi, partisipasi masyarakat setempat, dan peningkatan kesejahteraan pelaku pariwisata (Kemenparekraf, 2021). Regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengaitkan pembangunan destinasi dengan indikator pertumbuhan ekonomi inklusif.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

Selain kerangka regulasi, Kemenparekraf juga mengembangkan **Modul 2 Pelatihan "Sustainable Tourism Development" (2022**) yang berfokus pada peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal, penguatan UMKM, dan pemahaman terkait indikator keberlanjutan. Modul ini menekankan bahwa peningkatan kemampuan SDM lokal merupakan fondasi dalam mencapai target SDG 8, terutama dalam menciptakan pekerjaan berkualitas di desa wisata dan destinasi prioritas.

Meskipun terdapat kerangka regulasi yang kuat, implementasi SDG 8 di Indonesia menghadapi beberapa tantangan.

1. Pertama, **informalitas masih sangat tinggi**, terutama di sektor jasa langsung (pemandu wisata, transportasi, kuliner lokal).

2. Kedua, **keterbatasan data** tentang pekerjaan pariwisata misalnya data spesifik mengenai upah, kontrak kerja, dan jaminan sosial menghambat proses monitoring.

3. Ketiga, terdapat **ketimpangan kapasitas antar daerah**; tidak semua pemerintah daerah mampu mengoperasionalkan Permen 9/2021, terutama destinasi kecil yang minim anggaran dan tenaga ahli.

4. Keempat, **pemulihan pariwisata pasca-COVID sering menekankan peningkatan jumlah kunjungan** dibandingkan peningkatan kualitas pekerjaan.

Secara keseluruhan, penelitian Indonesia menunjukkan bahwa implementasi SDG 8 dalam sektor pariwisata telah menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat, tetapi masih memerlukan transformasi struktural agar pekerjaan yang tercipta betul-betul layak, stabil, dan berkelanjutan. Integrasi SDG 8 ke dalam kebijakan pariwisata nasional dan daerah sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata tidak hanya meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan pekerja dan kualitas hidup masyarakat lokal.

4. Implementasi SDGs 12 dalam Pariwisata

SDG 12 atau *Responsible Consumption and Production* merupakan pilar penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Prinsip konsumsi dan produksi berkelanjutan menekankan pengurangan limbah, efisiensi penggunaan sumber daya, serta perubahan perilaku konsumen dan pelaku usaha agar aktivitas pariwisata tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap lingkungan dan daya dukung destinasi. Dalam konteks Indonesia, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SDG 12 masih menghadapi tantangan signifikan, terutama pada aspek manajemen limbah pariwisata, penggunaan plastik sekali pakai, pengelolaan food waste di sektor perhotelan, serta rendahnya adopsi praktik ramah lingkungan oleh industri pariwisata.

Capaian awal implementasi SDG 12 dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah, termasuk terbitnya Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Regulasi ini menempatkan pengelolaan lingkungan sebagai salah satu pilar utama pengelolaan destinasi, termasuk pengurangan sampah, pengendalian daya dukung, efisiensi energi, dan pengelolaan air. Namun, penelitian Indonesia menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah dan kesediaan pelaku usaha untuk menerapkan standar lingkungan.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

Studi-studi di berbagai lokasi wisata Indonesia menunjukkan pola masalah dan inisiatif berikut.

1. **Food waste di perhotelan dan restoran**

   Penelitian empiris di Makassar dan Surabaya menegaskan bahwa hotel bintang menengah dan restoran menghasilkan jumlah sisa makanan yang signifikan, akibat pola buffet, porsi berlebih, serta rendahnya sistem monitoring makanan sisa (Darmayasa, dkk., 2024). Beberapa studi kasus hotel menunjukkan upaya pengurangan melalui audit dapur, pengaturan porsi buffet, donasi makanan yang layak, dan komposting organik, namun penerapan masih terbatas pada beberapa hotel pilot.

2. **Sampah plastik di destinasi populer (kasus Bali dan destinasi pesisir lain)** Bali tetap menjadi contoh paling sering dikaji: tingginya volume wisatawan menimbulkan akumulasi plastik di pesisir dan sungai, dan sejumlah penelitian lokal menganalisis efektivitas kebijakan larangan plastik sekali pakai, gerakan zero-waste komunitas, serta program pembersihan pantai dengan catatan pelaksanaan yang belum merata dan dukungan penegakan yang lemah (Rendragraha dan Dirgawati, 2024). Kajian tentang krisis sampah plastik menekankan perlunya kolaborasi pemerintah-daerah-komunitas dan model ekonomi sirkular lokal.

3. **Pengelolaan sampah di desa wisata dan kawasan kecil** Penelitian tentang penerapan konsep *zero waste* di desa wisata menggarisbawahi hambatan teknis (infrastruktur pengumpulan/transport), finansial (biaya pengolahan), serta aspek perilaku masyarakat dan wisatawan (Maksum dan Nurfadillah, 2024). Studi tentang pengelolaan sampah di tingkat desa merekomendasikan skema pemilahan di sumber, unit pengolahan sederhana (kompos, biodigester), dan penguatan ekonomi lokal melalui daur ulang.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian Indonesia, dapat disimpulkan bahwa implementasi SDG 12 dalam sektor pariwisata telah menunjukkan kemajuan dalam kerangka kebijakan, namun masih menghadapi tantangan signifikan pada level praktik. Pengelolaan sampah, food waste, penggunaan plastik, dan manajemen daya dukung lingkungan tetap menjadi isu utama yang menghambat pencapaian konsumi dan produksi berkelanjutan. Untuk memperkuat implementasi SDG 12, penelitian Indonesia merekomendasikan beberapa langkah strategis, termasuk: (1) memperluas regulasi pembatasan plastik sekali pakai pada destinasi wisata prioritas; (2) mendorong industri perhotelan dan restoran untuk menerapkan sistem pemantauan food waste; (3) memperkuat edukasi wisatawan melalui kampanye nasional pariwisata berkelanjutan; serta (4) mengembangkan sistem monitoring indikator lingkungan di setiap destinasi wisata.

Secara keseluruhan, implementasi SDG 12 di Indonesia menunjukkan bahwa keberlanjutan pariwisata tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal, tetapi juga oleh perubahan perilaku wisatawan dan pelaku industri serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola konsumsi dan produksi secara bertanggung jawab. Dengan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai model konsumsi-produksi berkelanjutan di level nasional.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

PEMBAHASAN

Temuan dari kajian literatur menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia pada periode 2019–2025 menunjukkan adanya kemajuan dalam kerangka regulasi, namun belum sepenuhnya optimal pada tahap operasional. Pemerintah telah menerbitkan Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 sebagai pedoman resmi pengembangan destinasi berkelanjutan dan meluncurkan berbagai modul pelatihan untuk mendukung peningkatan kapasitas aktor lokal. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan merata di seluruh daerah akibat perbedaan kapasitas pemerintah daerah, sumber daya finansial, serta tingkat komitmen para pemangku kepentingan.

Perbandingan Fokus Kebijakan SDG 8 dan SDG 12

Hasil kajian literatur dalam dokumen ini menunjukkan bahwa implementasi SDG 8 dan SDG 12 di sektor pariwisata Indonesia berkembang secara tidak seimbang. Pada **SDG 8**, kebijakan pariwisata berkelanjutan terlihat lebih menonjol karena berkaitan langsung dengan aspek ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja. Sejumlah penelitian pada konteks Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas pariwisata berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal dan membuka peluang bagi UMKM, termasuk pada destinasi prioritas maupun desa wisata. Dampak ini tercermin pada meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam usaha kuliner, akomodasi rumahan, transportasi wisata, serta industri kreatif berbasis lokal. Namun demikian, temuan dalam dokumen juga menegaskan bahwa kualitas pekerjaan yang tercipta masih menghadapi tantangan berupa tingginya sektor informal, pekerjaan musiman, serta minimnya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja. Artinya, meskipun SDG 8 menunjukkan progres pada aspek kuantitatif (penyerapan tenaga kerja), aspek kualitatif (*decent work*) masih belum optimal.

Sebaliknya, implementasi **SDG 12** menunjukkan tantangan yang lebih berat, sebagaimana tergambar melalui tiga studi kasus utama dalam dokumen: **food waste**, **sampah plastik**, dan **pengelolaan sampah destinasi**. Studi kasus food waste di Makassar dan Surabaya yang dilakukan oleh (Darmayasa, dkk., 2024) mengungkap bahwa hotel dan restoran menjadi produsen limbah makanan yang signifikan akibat sistem prasmanan, overproduksi dapur, serta kurangnya mekanisme monitoring limbah. Kasus ini menunjukkan bahwa konsumsi dan produksi di sektor hospitality belum sejalan dengan prinsip efisiensi sumber daya.

Pada kasus sampah plastik, contoh dari **Bali dan destinasi populer lainnya** memperlihatkan bahwa plastik sekali pakai (botol air minum, kantong, sedotan) masih mendominasi timbulan sampah wisata (Rendragraha dan Dirgawati, 2024). Meskipun beberapa daerah telah menerapkan regulasi pembatasan plastik sekali pakai, tingkat kepatuhan wisatawan dan pelaku usaha masih rendah. Hal ini menandakan lemahnya implementasi SDG 12 pada aspek **reduksi sumber sampah** dan **perubahan perilaku konsumsi**.

Sementara itu, studi kasus pengelolaan sampah di **desa wisata dan kawasan kecil** menunjukkan adanya inisiatif positif seperti bank sampah, kompos, biodigester, dan model ekonomi sirkular lokal (Maksum dan Nurfadillah, 2024). Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh kurangnya fasilitas, rendahnya partisipasi wisatawan, dan belum adanya sistem monitoring yang terintegrasi. Kasus-kasus ini menegaskan bahwa implementasi SDG 12 sangat dipengaruhi oleh kapasitas daerah, dukungan kelembagaan, dan edukasi publik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **SDG 8 lebih mudah tercapai karena berhubungan langsung dengan aktivitas ekonomi**, sedangkan **SDG 12 memerlukan perubahan sistemik pada perilaku konsumsi, pengelolaan limbah, dan standar operasional industri**. Ketiga studi kasus

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

dalam dokumen memperlihatkan bahwa tantangan utama SDG 12 bukan hanya pada teknis pengelolaan, tetapi juga pada rendahnya kesadaran dan komitmen aktor pariwisata.

Peran Kolaborasi Stakeholder dalam Mendukung SDG 8 dan 12

Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SDG dalam pariwisata sangat bergantung pada kolaborasi multi-pihak (pentahelix): pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media (Maghfira & Pratiwi, 2024). Pada kasus pengelolaan sampah destinasi, misalnya, penelitian pada beberapa desa wisata menunjukkan bahwa pengelolaan akan lebih efektif jika melibatkan masyarakat, pelaku usaha, dan komunitas lokal dalam pemilahan sampah, pengolahan limbah organik, serta kampanye kesadaran lingkungan. Demikian pula dalam konteks SDG 8, peningkatan kapasitas tenaga kerja dan UMKM hanya berhasil jika ada sinergi antara pemerintah dan industri pariwisata melalui program pelatihan dan sertifikasi.

Peluang Kebijakan

Dari hasil kajian, terdapat sejumlah peluang kebijakan yang dapat memperkuat implementasi SDG 8 dan SDG 12. Pertama, digitalisasi dapat digunakan untuk memperluas promosi UMKM, meningkatkan kapasitas SDM, dan mempermudah pemantauan indikator keberlanjutan destinasi. Kedua, pengembangan *community-based tourism* (CBT) terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan lokal dan memperkuat praktik konsumsi-produksi berkelanjutan (Pradini G., 2022). Ketiga, penguatan industri hijau melalui *green hotel certification*, manajemen energi yang efisien, dan praktik zero waste menjadi peluang strategis untuk memperbaiki mutu industri pariwisata.

GAP Penelitian

Tabel 1. GAP Penelitian pada Implementasi SDG 8 dan SDG 12 dalam Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan

No	Topik	Temuan Penelitian Yang Ada	Kekurangan / Gap Penelitian	Arah Penelitian Selanjutnya
1.	SDG 8 - Penciptaan Lapangan Kerja Pariwisata	Penelitian menunjukkan pariwisata membuka peluang kerja dan mendukung UMKM di berbagai destinasi.	Minim kajian kualitas pekerjaan (*decent work*), perlindungan sosial, dan tingkat informalitas di sektor pariwisata.	Analisis mendalam tentang standar kerja layak, jaminan sosial pekerja pariwisata, serta ketimpangan kualitas pekerjaan antar wilayah.
2.	SDG 8 - Pemberdayaan Komunitas & Desa Wisata	Studi menemukan desa wisata meningkatkan ekonomi lokal dan menyerap tenaga kerja komunitas.	Belum ada pemetaan nasional yang menilai efektivitas CBT dalam jangka panjang.	Kajian longitudinal tentang keberlanjutan ekonomi desa wisata dan kontribusinya terhadap indikator SDG 8.
3.	SDG 12 – Food Waste Di Hotel	Food waste di hotel/restoran	Belum ada kajian sistematis	Pengembangan model pengukuran food waste

	Bintang 3 Dan Bintang 4 Di Makassar (Darmayasa, dkk., 2024)	tinggi karena sistem prasmanan, overproduksi, dan kurangnya monitoring.	mengenai pengukuran food waste dan efektivitas intervensi reduksi limbah.	untuk industri hospitality serta evaluasi kebijakan pengurangan limbah makanan.
4.	SDG 12 - Isu Sampah Plastik di Wilayah Destinasi Pesisir Pantai Bali (Rendragraha dan Diirgawati, 2024)	Plastik sekali pakai mendominasi timbulan sampah wisata; kepatuhan wisatawan masih rendah.	Penelitian belum mengevaluasi efektivitas kebijakan pelarangan plastik dan perubahan perilaku wisatawan.	Kajian tentang efektivitas regulasi plastik sekali pakai serta strategi edukasi wisatawan yang paling berpengaruh.
5.	SDG 12 – Pengelolaan Sampah Desa Wisata di Kawasan Pesisir Bajo (Maksum dan Nurfadillah, 2024)	Ada inisiatif bank sampah, kompos, biodigester, namun masih terbatas.	Minim penelitian evaluatif mengenai performa jangka panjang dan keterlibatan stakeholder.	Pengembangan model kolaboratif (*pentahelix*) dan evaluasi kinerja pengelolaan sampah berbasis komunitas.

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa penelitian mengenai implementasi SDG 8 dan SDG 12 dalam kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi sejumlah kesenjangan penting. Pada SDG 8, penelitian lebih banyak berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi lokal, namun belum menyentuh aspek kualitas pekerjaan secara komprehensif. Hal ini menunjukkan perlunya kajian lebih dalam mengenai standar kerja layak, perlindungan sosial, serta dinamika informalitas yang masih mendominasi sektor pariwisata.

Sementara itu, pada SDG 12, studi-studi yang ada cenderung bersifat deskriptif dan menyoroti persoalan teknis seperti food waste, sampah plastik, dan pengelolaan sampah. Namun, belum banyak penelitian yang mengevaluasi efektivitas kebijakan, perilaku wisatawan, maupun kapasitas pengelolaan di tingkat destinasi. Padahal, isu-isu tersebut sangat menentukan keberhasilan penerapan konsumsi dan produksi berkelanjutan.

Secara umum, GAP penelitian ini memperlihatkan bahwa integrasi SDG 8 dan SDG 12 dalam kerangka pariwisata berkelanjutan masih memerlukan pendekatan yang lebih evaluatif, kolaboratif, dan berbasis indikator yang terukur. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada analisis implementasi kebijakan secara langsung di tingkat destinasi, pengembangan indikator terpadu, serta evaluasi terhadap intervensi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi yang telah diterapkan.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 5 No 2 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.34833/panorama.v1i1.1395

KESIMPULAN

Kajian literatur ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia pada periode 2019–2025 telah mengalami perkembangan, terutama melalui penguatan kerangka regulasi seperti Permenparekraf No. 9 Tahun 2021 dan modul pelatihan pariwisata berkelanjutan. Namun, implementasi keduanya belum sepenuhnya optimal di tingkat destinasi.

Dari sisi **SDG 8**, sektor pariwisata terbukti mampu menciptakan peluang ekonomi, menyerap tenaga kerja lokal, dan memperkuat UMKM daerah. Meskipun demikian, tantangan terkait informalitas pekerjaan, kurangnya perlindungan sosial, serta disparitas kapasitas antar daerah menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pekerjaan masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat dan komprehensif.

Sementara itu, pada **SDG 12**, upaya untuk mendorong konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab masih terbatas. Berbagai isu utama seperti food waste, sampah plastik, dan pengelolaan limbah destinasi menunjukkan bahwa praktik berkelanjutan belum terintegrasi secara sistematis dalam industri pariwisata. Implementasi kebijakan lingkungan masih bergantung pada komitmen daerah dan industri, serta belum didukung oleh sistem monitoring yang konsisten.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal:

1. **Pengembangan indikator SDG 8 dan SDG 12 yang lebih operasional** pada tingkat destinasi untuk memudahkan monitoring dan evaluasi.

2. **Peningkatan kapasitas pemerintah daerah**, terutama dalam pengelolaan limbah, penguatan SDM, dan pengawasan industri pariwisata.

3. **Kajian empiris lanjutan** tentang integrasi kebijakan berkelanjutan pada level desa wisata dan daerah prioritas.

4. **Penguatan digitalisasi dan inovasi hijau**, termasuk sistem pemantauan limbah, *green hotel*, dan integrasi ekonomi sirkular.

Secara keseluruhan, implementasi pariwisata berkelanjutan dalam perspektif SDG 8 dan SDG 12 masih berada pada tahap berkembang. Dengan memperkuat koordinasi multi-level dan meningkatkan komitmen pelaku industri, sektor pariwisata Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang secara inklusif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Ana, S., Endah Wahyuningsih, & Sari, D. P. (2024). PENGELOLAAN SAMPAH DI KAWASAN WISATA ALAM PUREKMAS SESAOT KABUPATEN LOMBOK BARAT. *Jurnal Sylva Scienteae*, *7*(4), 682–682. https://doi.org/10.20527/jss.v7i4.11658

Badrukamal, L. R., & Dirgawati, M. (2025). *View of Analisis Isu Sampah Plastik Laut di Wilayah Pesisir Pantai Kuta Bali Menggunakan Metode DPSIR*. Serambimekkah.id. https://jse.serambimekkah.id/index.php/jse/article/view/108/86

BPK. (2021). *Permenpar No. 9 Tahun 2021*. Database Peraturan | JDIH BPK. https://peraturan.bpk.go.id/Details/203906/permenpar-no-9-tahun-2021

Darmayasa, dkk. (2024). *View of FAKTA-FAKTA SISA MAKANAN (FOOD WASTE) DI HOTEL BINTANG 3 DAN BINTANG 4 DI MAKASSAR*. Ppb.ac.id. https://ejournal.ppb.ac.id/index.php/jbh/article/view/1607/1096

Gagih Pradini. (2022). MANFAAT EKONOMI KEGIATAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT DI PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI SETU BABAKAN JAKARTA SELATAN. *Turn Journal*, *2*(1), 47–57. https://journal.unas.ac.id/turn/article/view/1764

Husna, F. K. (2025). *View of Analisis dampak sektor pariwisata bagi perekonomian warga sekitar kawasan wisata Siblarak Polanharjo Kabupaten Klaten*. Nurscienceinstitute.id. https://journal.nurscienceinstitute.id/index.php/jerps/article/view/577/175

Kemenparekraf. (2020). *Statistik Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020*. Kemenpar.go.id; Kemenpar RI. https://kemenpar.go.id/direktori-statistik/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-2020

Kemenparekraf. (2022). *SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT MODUL 2*. https://api.kemenpar.go.id/storage/app/uploads/public/683/688/d7c/683688d7cd68c657966601.pdf

Kemenparekraf. (2025). *Sustainable Tourism Development_Modul 1*. Kemenpar.go.id; Kemenpar RI. https://kemenpar.go.id/hasil-pencarian/sustainable-tourism-development-modul-1

Lolkary, S. Y., & Laurens, S. (2024). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Perspektif Collaborative Governance. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(12), 14327–14333. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6269

Maghfira, S., & Pratiwi, W. D. (2024). KOLABORASI DAN SINERGITAS PERAN PENTAHELIX DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU PRAMUKA KEPULAUAN SERIBU. *Warta Pariwisata*, *22*(2), 61–66. https://doi.org/10.5614/wpar.2024.22.2.04

Muqsith, I. A., Mardiana, R., & Dharmawan, A. H. (2023). Pencapaian SDGs Pada Kawasan Ekowisata (Studi Kasus: Situ Gunung Kabupaten Sukabumi). *Jurnal Ilmu Lingkungan*, *21*(4), 740–754. https://doi.org/10.14710/jil.21.4.740-754

Tri Septian Maksum, & Ayu Rofia Nurfadillah. (2024). Upaya Mewujudkan Desa Wisata Zero Waste melalui Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kawasan Pesisir Bajo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi Pharmacare Society*, *3*(2), 39–47. https://doi.org/10.37905/phar.soc.v3i2.26636

United Nations. (2025). *Goal 8 | Department of Economic and Social Affairs*. United Nations; United Nations. https://sdgs.un.org/goals/goal8

Wonderful Indonesia. (2025). *SNAPSHOT SNAPSHOT Tourism Table of Content: Pemulihan Pariwisata Global Resiliensi Pariwisata Indonesia Potensi Krisis Pariwisata Indonesia 2025 Dampak Geopolitik Global Rekomendasi Strategis*. https://api.kemenpar.go.id/storage/app/uploads/public/689/053/528/6890535289c31007573722.pdf